

## BAB III

### METODA PENELITIAN

#### 3.1 Strategi Penelitian

Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian survei, yaitu suatu penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data (Morrisan, 2017). Desain penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, yakni penelitian yang menekankan pada data-data numerikal (angka) yang diolah berdasar metode statistika (Morrisan, 2017), dengan tujuan menguji hubungan antar dua variabel, tidak saja dalam bentuk sebab akibat melainkan juga timbal balik antara dua variabel dengan mengembangkan pemahaman atau mendiskripsikan banyak hal (Sugiyono, 2018). Adapun survei yang dilakukan adalah menguji pengaruh akuntabilitas, transparansi dan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan dengan *value for money*.

#### 3.2 Populasi dan Sampel

##### 3.2.1 Populasi penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki karakteristik tertentu dan memiliki kesempatan yang sama (Sugiyono, 2018). Populasi dalam penelitian ini dibatasi dengan menganalisis data sekunder dengan pengambilan populasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintahan Kota Jakarta Pusat yang berjumlah 42 SKPD. Adapun populasi terfokus pada jabatan sebagai Kepala Dinas dan Kepala Bagian Keuangan di SKPD Kota Jakarta Pusat sebanyak 95 orang.

Berikut daftar SKPD Kota Jakarta Pusat yang meliputi:

| No | Unit Kerja                                                     |
|----|----------------------------------------------------------------|
| 1  | Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta                  |
| 2  | Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi DKI Jakarta |
| 3  | Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta                      |
| 4  | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta       |
| 5  | Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta                   |
| 6  | Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta               |

|    |                                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta                                                     |
| 8  | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta                                                |
| 9  | Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta                                                               |
| 10 | Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta                                                       |
| 11 | Biro Kepala Daerah Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta                                               |
| 12 | Biro Kerja Sama Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta                                                  |
| 13 | Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta                                        |
| 14 | Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta                          |
| 15 | Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta                                               |
| 16 | Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta                                                |
| 17 | Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta                             |
| 18 | Biro Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta                                   |
| 19 | Biro Umum & Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta                                         |
| 20 | Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta                                                                    |
| 21 | Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta                                         |
| 22 | Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta                                                                     |
| 23 | Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta                                      |
| 24 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta                                         |
| 25 | Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta                                     |
| 26 | Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Pusat                         |
| 27 | Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat                                             |
| 28 | Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat                         |
| 29 | Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat                             |
| 30 | Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat                                                     |
| 31 | Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat                                              |
| 32 | Suku Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Pusat                                |
| 33 | Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Pusat                                           |
| 34 | Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat                     |
| 35 | Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Pusat                                                                |
| 36 | Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat                                                             |
| 37 | Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Pusat                                                   |
| 38 | Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat                                      |
| 39 | Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha kecil Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat |
| 40 | Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Pusat                                                        |
| 41 | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Admistrasi Jakarta Pusat                                                 |
| 42 | Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat                         |

### 3.2.2 Sampel penelitian

Sampel adalah bagian dari populasi yang memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai obyek penelitian (Sugiyono, 2018). Karakteristik sampel penelitian didasarkan pada teknik pengambilan sampel secara *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Berdasarkan teknik pengambilan sampel tersebut, maka kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Memiliki jabatan sebagai Kepala Dinas SKPD Kota Jakarta Pusat, Kepala Bagian Keuangan, dan Staf Bagian Keuangan.
2. Memiliki masa kerja selama 1 tahun lebih pada Dinas dan Badan di SKPD Kota Jakarta Pusat.

### 3.3 Data dan Metoda Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer yang diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti sebagai objek penulisan (Morrison, 2017). Data primer dalam penelitian ini bersumber dari metode survei dalam bentuk kuesioner yang didapat dari responden untuk dianalisis berdasarkan daftar pernyataan kuesioner. Kuesioner disebarkan kepada seluruh Kepala Dinas SKPD Jakarta Pusat, Kepala Bagian Keuangan, dan Staf Bagian Keuangan di SKPD Kota Jakarta Pusat yang telah dipilih sebagai sampel penelitian. Tipe pernyataan dalam kuesioner bersifat tertutup, yakni pernyataan yang mengharapkan jawaban singkat atau responden diminta memilih salah satu alternatif jawaban dari setiap pernyataan yang diajukan. Berdasarkan pengukuran konstruk sikap, metode yang digunakan dalam pemberian skor atau nilai adalah skala likert. Skala likert adalah metode yang mengukur sikap dengan menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap subjek, objek, atau kejadian tertentu. Dalam penelitian ini, responden diminta mengisi pernyataan dalam skala interval berbentuk verbal dalam lima kategori (Morrison, 2017). Lihat Tabel 3 berikut:

**Tabel 3.1. Skala Likert**

| Keterangan                | Skor | Keterangan                                                   |
|---------------------------|------|--------------------------------------------------------------|
| Sangat Setuju (SS)        | 5    | Sangat Setuju, dengan setiap pertanyaan yang diajukan.       |
| Setuju (S)                | 4    | Setuju, dengan setiap pertanyaan yang diajukan.              |
| Ragu – Ragu (N)           | 3    | Ragu-Ragu, dengan setiap pertanyaan yang diajukan.           |
| Tidak Setuju (TS)         | 2    | Tidak Setuju, dengan setiap pertanyaan yang diajukan.        |
| Sangat Tidak Setuju (STS) | 1    | Sangat Tidak Setuju, dengan setiap pertanyaan yang diajukan. |

Sumber: Morrisian (2017)

### 3.4 Operasionalisasi Variabel

Variabelnya adalah variabel independen (bebas) yaitu akuntabilitas (X1), transparansi (X2), dan pengawasan (X2); sementara variabel dependen (terikat) yaitu kinerja pemerintahan dengan *value for money* (Y). Definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel bebas (X), yaitu:

a. Akuntabilitas (X1)

Adalah prinsip pertanggungjawaban serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan untuk memberikan informasi dan penyingkapan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Indikator akuntabilitas terdiri atas empat dimensi, yakni akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program dan akuntabilitas kebijakan (Mardiasmo, 2018). Instrumen ini menggunakan skala pengukuran interval dengan skala Likert diperoleh dari hasil kuesioner.

b. Transparansi (X2)

Merupakan keterbukaan pemerintahan dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Indikator transparansi terdiri

atas empat dimensi, yakni kerangka kerja hukum bagi transparansi, akses masyarakat terhadap transparansi anggaran, audit yang independen dan efektif, serta keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran. Instrumen ini menggunakan skala pengukuran interval dengan skala Likert diperoleh dari hasil kuesioner.

c. Pengawasan (X3)

Merupakan kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan pendapatan-pendapatan daerah dan pembelajaan pengeluaran-pengeluaran daerah berjalan sesuai dengan rencana, aturan-aturan, dan tujuan yang telah ditetapkan. Indikator pengawasan terdiri atas tiga dimensi, yakni *input* (masukan) pengawasan, proses pengawasan dan *output* (keluaran) pengawasan. Instrumen ini menggunakan skala pengukuran interval dengan skala Likert diperoleh dari hasil kuesioner.

2. Variabel terikat (Y), yaitu:

Kinerja pemerintahan dengan *value for money* adalah kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Indikator kinerja didasarkan atas *value for money* terdiri atas tiga dimensi, yakni ekonomis, efisien dan efektivitas. Instrumen ini menggunakan skala pengukuran interval dengan skala Likert.

Tabel 3.2 berikut memaparkan definisi operasionalisasi sebagai pijakan atas variabel-variabel yang digunakan untuk kemudian diuji dalam bab pembahasan selanjutnya.

Tabel 3.2. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

| Variabel           | Definisi                                                                                                                           | Indikator                                                                                                                          | Skala  | Sumber           |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|
| Akuntabilitas (X1) | Prinsip pertanggungjawaban serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan untuk memberikan informasi dan penyingkapan kepada pihak- | - akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum<br>- akuntabilitas proses<br>- akuntabilitas program dan akuntabilitas kebijakan | Likert | Mardiasmo (2018) |

| Variabel                                                | Definisi                                                                                                                                                                                              | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                | Skala  | Sumber                                               |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------|
|                                                         | pihak yang berkepentingan                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                      |
| Transparansi (X2)                                       | Keterbukaan pemerintahan dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- kerangka kerja hukum bagi transparansi</li> <li>- akses masyarakat terhadap transparansi anggaran</li> <li>- audit yang independen dan efektif</li> <li>- keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran</li> </ul> | Likert | Riharjo (2017); Arifani (2018) dan Damayanti (2018), |
| Pengawasan (X2)                                         | Kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan pendapatan-pendapatan daerah dan pembelajaran pengeluaran-pengeluaran daerah berjalan sesuai dengan rencana, aturan-aturan, dan tujuan yang telah ditetapkan | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Input</i> (masukan) pengawasan</li> <li>- Proses pengawasan</li> <li>- <i>Output</i> (keluaran) pengawasan</li> </ul>                                                                                                        | Likert | Mardiasmo (2018)                                     |
| Kinerja pemerintahan dengan <i>value for money</i> (Y). | Kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ekonomis</li> <li>- Efisien</li> <li>- Efektivitas</li> </ul>                                                                                                                                                                   | Likert | Purwiyanti (2017)                                    |

| Variabel | Definisi | Indikator | Skala | Sumber |
|----------|----------|-----------|-------|--------|
|          | daerah   |           |       |        |

### 3.5 Metoda Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah model analisis statistik dengan menggunakan SPSS. Peneliti melakukan terlebih dahulu uji asumsi klasik sebelum melakukan pengujian regresi linear berganda dan uji residual sebagai pemoderasi.

#### 3.5.1 Uji Asumsi Klasik

Beberapa uji asumsi klasik yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain:

##### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak ghozali (2016). Model analisis yang digunakan untuk melakukan pengujian adalah *One-Sample Kolomogrov-Smirnov Test*. Model regresi dikatakan memiliki residual berdistribusi normal apabila *Asymp. Sig (2-tailed)* diatas signifikansi sebesar 0,05.

##### 2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menunjukkan adanya hubungan linear antara variabel independen. Sebagaimana dijelaskan Santoso (2018), jika antar variabel berkorelasi dengan sempurna maka model kuadrat terkecil tidak dapat digunakan. Metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinearitas adalah dengan menggunakan nilai *Value Inflation Faktor* (VIF). Dimana:

- Toleransi value  $< 0,01$  atau  $VIF > 10 \rightarrow$  terjadi multikolinearitas
- Toleransi value  $> 0,01$  atau  $VIF < 10 \rightarrow$  tidak terjadi multikolinearitas.

##### 3. Uji Heteroskedastisitas

Asumsi pokok dari model regresi linier klasik adalah bahwa gangguan (*disturbance*) yang muncul dalam regresi adalah heteroskedastisitas. Santoso (2018) menjelaskan bahwa uji heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari

residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan melakukan uji *Park*. Bila nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  maka akan terjadi homoskedastisitas yaitu varian variabel independen adalah konstan untuk setiap nilai tertentu variabel independen. Sebaliknya, apabila nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , berarti terjadi heteroskedastisitas.

### 3.5.2 Pengujian Hipotesis Penelitian

#### 3.5.2.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan menggunakan analisis berganda (*multiple regression analysis*) karena terdiri dari dua variabel independen dan satu variabel dependen. Analisis regresi berganda bertujuan untuk mengukur hubungan antara dua variabel atau lebih, dan menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen (Ghozali, 2015). Modal regresi yang digunakan adalah :

$$KINERJA (Y) : Y = 8,464 + 0.126AK + 0.796TP - 0.385PG + e$$

Keterangan : Y = Kinerja pemerintahan dengan *value for money*  $\alpha$  = Konstanta  $\beta_1$  = Koefisien dari Akuntabilitas  $\beta_2$  = Koefisien dari Transparansi  $\beta_3$  = Koefisien dari Pengawasan  $X$  = Variabel bebas.

#### 3.5.2.2 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji  $R^2$  atau disebut juga koefisien determinasi adalah angka yang menunjukkan besarnya derajat kemampuan atau distribusi variabel bebas dalam menjelaskan atau menerangkan variabel terikatnya dalam fungsi yang bersangkutan atau untuk mengukur kedekatan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Besarnya nilai  $R^2$  diantara nol dan satu ( $0 < R^2 < 1$ ). Jika nilainya semakin mendekati satu, maka model tersebut baik dan tingkat kedekatan antara variabel bebas dan variabel terikatpun semakin dekat pula. Jika Koefisien determinasi  $> 0,5$  maka pemilihan Variabel  $X_1$  dan  $X_2$  terhadap Y sudah benar. Jika koefisien determinasi  $< 0,5$  maka pemilihan Variabel  $X_1$  dan  $X_2$  terhadap Y tidak tepat (Santoso, 2018).

### 3.5.2.3 Uji Signifikansi Parsial (Uji – t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan *significance level* 0,05 ( $\alpha=5\%$ ). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikan  $> 0,05$  maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikan  $\leq 0,05$  maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Santoso, 2018).